

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Pengambilan Keputusan (*Decision Making*)**

Pengambilan keputusan merupakan proses mengevaluasi berbagai alternatif yang bertujuan untuk memecahkan masalah atau potensi masalah yang dihadapi pribadi atau kelompok. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengambilan keputusan (*decision making*) didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Menurut Drummond (1991) dalam Muhdi, dkk (2018) menyatakan bahwa pengambilan keputusan yang baik terjadi apabila pengambil keputusan mengerti latar belakang, tujuan dan sasaran, alternatif penyebab tindakan serta konsekuensi keputusan yang diambil. Namun tidak semua keputusan yang baik merupakan keputusan yang efektif dan aktivitas pengambilan keputusan tersebut dapat dilakukan secara disadari atau tidak disadari oleh pembuat keputusan.

Keputusan yang efektif dilihat dari kualitas keputusan, respon penerima, dan ketepatan waktu. Menurut James A.F. Stoner (1996) mengungkapkan bahwa pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Keputusan dikatakan bermutu apabila mampu memecahkan suatu masalah yang dihadapi dan mempengaruhi pihak-pihak yang terkait langsung pada keputusan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya keputusan yang

efektif ialah keputusan yang dibuat dengan baik dan dapat diimplementasikan dengan baik pula.

Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Menurut George R Terry (1958) menyatakan bahwa pengambilan keputusan sebagai pemilihan didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif, sedangkan Claude S. George (1972) mengungkapkan pengambilan keputusan dilakukan oleh beberapa manajer yang memiliki suatu kesadaran dalam mempertimbangkan, menilai maupun memilih berbagai alternatif. Siagian mengartikan pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data, penelitian yang matang atas berbagai alternatif dan tindakan. Menurut Atmusudirjo (1990) dalam Idaarah (2018) Pengambilan keputusan juga bermakna sebagai “pengakhiran atau suatu proses pemikiran tentang suatu permasalahan dalam rangka menjawab pertanyaan “apa” yang harus dilakukan guna mengatasi permasalahan tersebut dengan cara memilih alternatif yang diberikan.

Para ahli menyimpulkan bahwa pengambilan keputusan pada prinsipnya merupakan problematika antara rasionalitas dan kekuatan, artinya pengambilan keputusan melibatkan rangkaian yang tersusun seperti (1) memahami atau mengenal masalah yang dihadapi (2) mempertimbangkan dan menilai alternatif yang dapat menjawab permasalahan (3) memutuskan (4) melaksanakan keputusan yang telah diambil dan (5) menilai hasil keputusan yang telah dilaksanakan. Seorang pengambil keputusan dituntut untuk menggunakan pemikiran rasional serta kekuatan yang

dimilikinya guna membuktikan bahwa keputusan yang diambil dapat mencapai tujuan yang dihendaki.

Pengambilan keputusan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang pengaplikasiannya melalui sebuah tindakan. Menurut Frederick Winslow Taylor (1998) dalam Suryadi (2016) mengemukakan bahwa pengambilan keputusan merupakan tindakan pemilihan alternatif. Hal ini berkaitan dengan fungsi manajemen seperti merencanakan, mengelola, mengontrol, dan membuat keputusan. Fungsi pengambilan keputusan bagi individu atau kelompok baik secara organisasional atau institusional sifatnya futuristik. Keputusan yang diambil menggunakan pendekatan perilaku organisasi harus menunjukkan hasil yang rasional. Rasionalisasi yang digunakan yaitu kesesuaian antar tujuan dan rencana yang telah disusun.

Manajer perusahaan melakukan pengambilan keputusan yang memiliki manfaat bagi kelangsungan pertumbuhan perusahaan. Pengambilan keputusan yang dilakukan, diperlukan adanya beberapa informasi yang berguna sebagai dasar pertimbangan oleh manajer. Salah satu informasi yang sangat vital adalah informasi akuntansi, yang didalamnya mencakup informasi mengenai operasi, keuangan, manajemen dan perpajakan. Oleh karena itu, informasi akuntansi menjadi hal yang perlu diperhatikan dan memegang perananan penting dalam pengambilan keputusan.

Pengambilan keputusan mempunyai sifat menafsirkan kejadian dimasa yang akan datang dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara individual atau kelompok. Namun, apabila seseorang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi maka

mempengaruhi pandangannya dalam mengambil suatu keputusan. Keputusan yang dibuat oleh manajer disesuaikan dengan kebutuhan usahanya. Semakin besar proses bisnis suatu usaha akan meningkatkan kebutuhan informasi akuntansi sebagai alat pengambilan keputusan manajerial. Pengetahuan akuntansi sangat diperlukan oleh manajer dalam menjalankan operasi usahanya, berguna untuk meningkatkan pemahaman manajer dalam menerapkan akuntansi. Kemampuan dan keahlian akuntansi manajer mempengaruhi penyajian dan penggunaan informasi akuntansi untuk membuat keputusan.

#### **2.1.1.1 Dasar Pengambilan Keputusan**

George R.Terry (1958) menyatakan bahwa “*management is the accomplishing of a prederetemined objectives through the efforts of otherpeople*” atau manajemen adalah penetapan tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui upaya orang lain dan mengungkapkan beberapa dasar pengambilan keputusan antara lain:

##### **a. Intuisi**

Menurut Ibnu (2000) bahwa pengambilan keputusan berdasarkan perasaan yang sifatnya subjektif seperti hasil dari menduga-duga, mudah tersugesti, dan faktor kejiwaan lainnya. Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi membutuhkan waktu yang singkat sesuai dengan masalah yang memiliki dampak terbatas. Akan tetapi, pengambilan keputusan ini sulit diukur kebenarannya karena hanya diputuskan oleh satu pihak saja sehingga tidak adanya pembanding.

b. Pengalaman

Pengambilan keputusan yang didasari oleh pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi sebelumnya. Keputusan yang didasari oleh pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis, karena dapat memperkirakan latar belakang masalah dan memperhitungkan baik buruknya suatu keputusan.

c. Fakta

Keputusan yang berdasarkan oleh fakta-fakta, data atau informasi sehingga dapat memberikan keputusan yang sehat dan solid. Dengan fakta yang ada, tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan tinggi sehingga keputusan dapat diterima.

d. Wewenang

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan seperti pemimpin terhadap bawahannya. Keputusan wewenang biasanya mengasosiasikan dengan praktik diktatorial dan bersifat rutin.

e. Rasional

Dalam keputusan yang berdasarkan logika, keputusan yang dihasilkan akan bersifat logis, objektif, transparan, dan konsisten untuk memaksimalkan hasil yang diinginkan.

### 2.1.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan

Keputusan yang dipilih merupakan keputusan yang baik dari beberapa alternatif dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Mintzerg

dalam Leny (2016) memberikan pernyataan terkait dengan tahap-tahap pengambilan keputusan sebagai berikut :

- a. Tahap identifikasi, di mana pengenalan masalah atau kesempatan muncul dan di diagnosis dibuat dan diketahui bahwa masalah yang berat mendapatkan analisis yang ekstensif dan sistematis.
- b. Tahap pengembangan, di mana pencarian prosedur atau solusi standar yang ada mendesain solusi yang baru. Diketahui bahwa proses desain merupakan proses pencarian percobaan dimana pembuat keputusan hanya mempunyai ide solusi ideal yang tidak jelas.
- c. Tahap seleksi, di mana solusi pilihan solusi dibuat. Terdapat 3 (tiga) cara dalam pembentukan seleksi: dengan penilaian pembuat keputusan, berdasarkan pengalaman atau intuisi, bukan analisis logis: dengan analisis alternatif yang logis dan sistematis: dan dengan tawar-menawar saat seleksi melibatkan kelompok pembuat keputusan dan semua manuver politik yang ada. Sekali keputusan diterima secara formal, otorisasi pin kemudian dibuat.

### **2.1.2 Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)**

Koperasi berasal dari bahasa latin “*coopere*” yang bahasa Inggris disebut *Cooperation*. “*Co*” berarti bersama dan “*Operation*” berarti bekerja, jadi *Cooperation* berarti bekerja sama. Dalam hal ini, kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. Berdasarkan *International Cooperative Alliance* karangan P.E. Weraman memberikan pernyataan bahwa koperasi

adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk perbaikan social ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan saling membantu antara satu dengan yang lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus didasari atas prinsip-prinsip koperasi. Dalam Undang-undangan Nomor 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badna hokum koperasi yang berlandaskan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas azas kekeluargaan.”

Dalam keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/KepM.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, sebagai berikut:

- a. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badna hokum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sealigus sebagai gerakan ekonomi rakyat.
- b. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), yaitu koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah).
- c. Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), yaoutu unit koperasi yang bergerak dibidang usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.

Perkembangan praktek usaha koperasi yang dikelola secara syariah di masyarakat dengan mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi

masyarakat. Dalam perkembangan itu menumbuhkan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) yang bernaung dalam kehidupan payung hukum koperasi.

*Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) merupakan Lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya dengan konsep *baitul maal* dan *baitut tamwil*. Defisini operasional KJKS adalah lembaga usaha ekonomi rakyat kecil yang beranggotakan orang atau badan hukum berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi yang memiliki ciri khas sebagai lembaga keuangan syariah non bank yang memiliki legalitas dan berbadan hukum.

Dalam menjalankan usahanya, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) harus mempunyai kegiatan usaha yang jelas dibidang pembiayaan dan simpan pinjam yang dilakukannya. Koperasi mempunyai anggota minimal 20 orang yang memenuhi syarat dan susunan kepengurusan diatur dalam AD/ART koperasi, dengan berazaskan kekeluargaan dan kebersamaan (dari anggota, oleh anggota, untuk anggota). Rapat anggota tahunan merupakan pertemuan semua pengurus dan anggota untuk mengambil keputusan berdasarkan laporan dan data yang telah di pertanggungjawabkan dan mengevaluasi guna peningkatan pelayanan dan kesejahteraan para anggotanya. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) harus dikelola secara professional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan lembaga keuangan, sehingga dapat

memberikan kepercayaan dan manfaat sebesar-besarnya bagi anggota dan masyarakat sekitarnya.

### **2.1.2.1 Azas dan Landasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)**

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan / koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme sebagai lembaga keuangan syariah. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk berkembang, adanya harapan untuk mencapai kesuksesan di dunia dan akhirat dengan keterpaduan antara sisi social dan bisnis. Kekeluargaan dan kebersamaan berarti mencapai kesuksesan diraih secara bersama. Kemandirian dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) berarti tidak dapat hidup hanya dengan pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat maka memerlukan pengelolaan yang profesional. Dalam pengelolaan usahanya, koperasi syariah memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggotanya pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan social ekonominya.
- b. Memperkuat sumber daya insani anggota agar menjadi professional, amanah, konsisten dan konsekuen prinsip syariah.

- c. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- d. Sebagai mediator antara penyandang dana dengan pengguna dana sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
- e. Mempererat silaturahmi antar kelompok anggota, sehingga mampu bekerja sama melakukan kontrol koperasi secara efektif.
- f. Menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif anggota.
- g. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.

### 2.1.3 Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah yaitu *baitul maal* dan *bait at-tamwil*. Konsep *baitul maal* lebih mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infaq, dan shadaqah. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial yang dimana untuk mendapatkan laba. Usaha tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari BMT yang merupakan lembaga keuangan mikro yang berdasarkan prinsip syariah dan berbadan hukum koperasi, yakni Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Usaha Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS Koperasi) yang diatur dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91 Tahun 2004 (Kepmen No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004) dan legalitas BMT mengikuti ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan koperasi yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam penjelasannya menyebutkan bahwa dalam UUD 1945

menyatakan perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Elfa (2016) menyebutkan bahwa BMT merupakan organisasi bisnis (*baitul maal*) dan berperan sosial (*baitut tamwil*). Sebagai lembaga sosial, *baitul maal* yang berfungsi dan berperan sama seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan *baitut tamwil* mempunyai peran bisnis yang mengembangkan usahanya di sektor keuangan, yakni simpan pinjam yang menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkan ke sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Perbedaan antara BMT dan bank terletak pada obyek dana, jika bank dapat menarik dana dari masyarakat tanpa syarat sedangkan BMT hanya boleh menarik dana dari masyarakat dengan syarat menjadi anggota atau calon anggota. Namun, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan bisnisnya pada sektor riil atau keuangan. Guna mencapai tujuan tersebut, BMT memiliki fungsinya dalam beberapa hal:

1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi anggota dan kelompok anggota muamalat didaerahnya.
2. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadikan lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
3. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota, selain itu dapat melakukan penggalangan dan mobilisasi atas potensi tersebut sehingga mampu melairkan nilai tambah kepada anggota dan masyarakat.

4. Menjadi perantara keuangan antara *agniya'* sebagai *shahibul maal* dengan *dhu'afa'* sebagai *mudharib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, dan lain-lain. BMT sebagai *amil* bertugas menerima dana tersebut dan selanjutnya akan disalurkan kepada golongan-golongan yang membutuhkan.
5. Menjadi perantara keuangan, antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dan untuk pengembangan usaha.

#### **2.1.4 Penggunaan Informasi Akuntansi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2019), penggunaan adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu; pemakaian. Informasi akuntansi diartikan suatu informasi kuantitatif yang berkaitan dengan fakta dan data guna membantu dan mengatur suatu perusahaan dari berbagai macam masalah yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Belkaoui (2000) dalam Dwi (2017) menyebutkan bahwa penggunaan informasi akuntansi yaitu perencanaan, pengawasan manajemen dan pengawasan operasional. Informasi akuntansi juga berguna bagi perusahaan yang beroperasi di lingkungan yang dinamis dan kompetitif karena membantu para manajer dalam mengintegrasikan inisiatif operasional dalam perencanaan jangka panjang. Informasi akuntansi digunakan oleh banyak pihak atau pengguna sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Kepentingan antar satu pengguna dengan pengguna lainnya tidak sama sehingga informasi yang dicaripun berbeda, para pengguna

informasi akuntansi seperti pemilik, manajer perusahaan, kreditur, pemerintah, analisis keuangan dan karyawan.

Manajer perusahaan membutuhkan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan manajerial dan bisnis, investor tentunya dalam ekspektasi dan harapan terhadap hasil investasinya dalam bentuk usaha dan keuntungan (deviden), kreditur berkepentingan terhadap kemampuan bayar terhadap kewajiban perusahaan dalam menyelesaikan pinjamannya, pemerintah memerlukan informasi terhadap pajak dan regulasi (peraturan), analisis keuangan menggunakan akuntansi untuk dasar menyatakan pendapat terhadap investasi yang akan direkomendasikan, karyawan berguna untuk mendukung pengembangan karir dan penghasilan yang lebih baik. Informasi akuntansi haruslah relevan, andal, tepat waktu, dapat dipahami, dan dapat diperbandingkan dimana informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemakai dalam mengevaluasi masa lalu, masa kini, dan membantu dalam pengambilan keputusan masa depan. Susanto (2008) dalam Alex dan Elisabeth (2015) mengatakan bahwa jenis akan kebutuhan informasi akuntansi tergantung pada besar atau kecilnya dan keragaman bidang usahanya yang digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja sehingga dapat dijadikan tolak ukur dalam memberikan *reward* atas kinerja manajerial.

Holmes dan Nichollas (1998) dalam Dwi (2017) mengklasifikasikan informasi akuntansi dalam tiga jenis berdasarkan manfaatnya bagi para pemakai, yaitu:

a. *Statutory Accounting Information*

Informasi akuntansi yang harus disiapkan sesuai dengan peraturan yang ada, sebagai contohnya: Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indoensia (IAI) sebagai suatu pedoman penyusunan laporan keuangan yang disajikan kepada pihak eksternal perusahaan.

b. *Budgetary Information*

Informasi akuntansi membantu manajemen untuk menjamin operasional perusahaan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Informasi akuntansi yang disajikan dalam bentuk anggaran berguna bagi pihak internal dalam perencanaan, penilaian, dan pengambilan keputusan.

c. *Additional Accounting Information*

Informasi akuntansi yang disiapkan perusahaan untuk meningkatkan efektifitas pengambilan keputusan manajer, seperti laporan persediaan, laporan gaji karyawan, laporan jumlah produksi dan laporan biaya produksi.

Dari definisi yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa penggunaan informasi akuntansi merupakan proses atau pemakaian informasi akuntansi yang berupa data kuantitatif yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam mengimplementasikan strategi dan melakukan aktivitas operasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan.

#### 2.1.4.1 Jenis Penggunaan Informasi Akuntansi

Informasi akuntansi pada dasarnya bersifat keuangan yang bertujuan untuk pengambilan keputusan, pengawasan, dan implementasi keputusan-keputusan perusahaan. Agar data keuangan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pihak eksternal maupun internal, maka data tersebut harus disusun dalam laporan yang sesuai. Menurut Anthony dan Reece (1995) dalam Alex dan Elisabeth (2015), informasi akuntansi digolongkan menjadi tiga jenis yaitu informasi operasi, akuntansi manajemen, dan akuntansi keuangan sedangkan Munawir (2002) dan Mulyadi (2001) dalam Yulia (2017) indikator penggunaan informasi akuntansi sebagai berikut:

##### a) Penggunaan Informasi Operasi

Informasi operasi dibutuhkan oleh manajemen guna mengendalikan atau mengarahkan kegiatan operasional. Informasi operasi yang terdapat dalam perusahaan pada umumnya meliputi informasi penjualan, informasi produksi, informasi penggajian, informasi utang-piutang, pembelanjaan, aktiva tetap, dan informasi lainnya yang saling berkaitan. Dalam suatu perusahaan terdapat departemen keuangan yang bertanggungjawab atas seluruh transaksi yang terjadi, misalnya seluruh transaksi bisnis, operasi catatan akuntansi, dan penyajian laporan keuangan.

##### b) Penggunaan Informasi Akuntansi Keuangan

Mustaghfirah (2016) menjelaskan bahwa informasi akuntansi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pemanfaatan informasi akuntansi yang digunakan oleh para penggunanya berdasarkan penyajian lapooran keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

c) Penggunaan Informasi Akuntansi Manajemen

Seorang manajer dalam suatu usaha, baik *top manager*, *middle manager*, dan *low manager*, biasanya hanya membaca ringkasan atas suatu informasi guna menjalankan operasional usaha sebagaimana mestinya. Menurut Munawir (2002) dalam Yulia (2017) mengatakan bahwa informasi akuntansi yang dipersiapkan untuk membantu manajemen disebut *management accounting information*. Informasi tersebut digunakan dalam tiga fungsi manajemen yaitu (1) perencanaan, (2) Implementasi Pengolahan Keuangan, dan (3) Fungsi Pengendalian. Menurut Widjayanto (2001) dalam Dwi (2017) informasi-informasi yang dibutuhkan oleh manajemen pada dasarnya meliputi:

- a. Jumlah pendapatan dan biaya yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu,
- b. Posisi keuangan perusahaan yang meliputi aktiva, kewajiban, dan ekuitas perusahaan secara historis,
- c. Informasi manajerial lain yang terperinci sebagai pendukung, seperti informasi mengenai pendapatan, biaya, aktiva dan ekuitas,

d. Informasi yang harus disajikan kepada *stake holder* atau pihak eksternal yang berkepentingan dalam perusahaan seperti instansi pajak, bank, kreditur, dan pemegang saham.

d) Penggunaan Informasi Akuntansi Pajak

Pemerintah memerlukan informasi akuntansi guna menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar suatu usaha, sedangkan pihak internal usahapun memerlukan agar dapat menjalankan kewajibannya untuk taat pajak dan tidak dikenakan sanksi perpajakan dari instansi terkait. Oleh karena itu, informasi akuntansi harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan.

### 2.1.5 Persepsi Tingkat Pendidikan

Andrew E. Sekula (1981) dalam Desak, dkk (2016) menyatakan tingkat pendidikan merupakan suatu proses jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, yang mana tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum. Pendapat Suprihanto mengatakan bahwa pendidikan mempunyai fungsi penggerak sekaligus pemacu terhadap potensi kemampuan sumber daya manusia dalam meningkatkan prestasi kerja dan nilai kompetensi seseorang pekerja melalui program pendidikan, pengembangan diri, dan pelatihan. Tingkat pendidikan berasal dari pengaruh lingkungan terhadap individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tetap dalam kebiasaan perilaku, pikiran, dan sikapnya.

### 2.1.5.1 Indikator Tingkat Pendidikan

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, indikator tingkat pendidikan seperti jenjang pendidikan dan kesesuaian jurusan, sedangkan Tirtarahardja menambahkan bahwa kompetensi juga merupakan indikator tingkat pendidikan. Terdapat tiga indikator tingkat pendidikan tersebut antara lain:

#### 1. Jenjang Pendidikan

Jenjang pendidikan merupakan tahapan yang berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan terdiri dari:

- a. Pendidikan Formal: pendidikan yang diperoleh di bangku sekolah formal antara lain Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan yang sederajat, Diploma III (D-III), Sarjana (S-1) dan Pascasarjana (S-2 dan S-3).
- b. Pendidikan Nonformal: jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- c. Pendidikan Informal: pendidikan yang berasal dari keluarga dan lingkungan yang berpengaruh terhadap sikap dan kepribadiannya.

#### 2. Kesesuaian Jurusan

Kesesuaian jurusan adalah sebelum karyawan direkrut terlebih dahulu perusahaan menganalisis tingkat pendidikan dan kesesuaian jurusan pendidikan pegawai

tersebut agar dapat ditempatkan pada posisi jabatan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan.

### 3. Kompetensi

Kompetensi adalah pengetahuan, penguasaan terhadap tugas, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.

Tingkat pendidikan mempunyai tujuan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang terarah agar membentuk manusia seutuhnya, sadar akan dirinya dan dapat memanfaatkan lingkungannya untuk meningkatkan taraf hidupnya.

#### 2.1.6 Skala Usaha

Nichollas dan Holmes (1989) dalam Erna (2017) menyatakan bahwa skala usaha merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola usahanya dengan melihat berapa jumlah karyawan yang dipekerjakan dan berapa besar pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode akuntansi. Jumlah pendapatan atau penjualan yang dihasilkan perusahaan dapat menunjukkan modal atau asset yang dimiliki oleh perusahaan sehingga semakin besar pendapatan atau penjualan suatu usaha maka semakin besar pula tingkat kompleksitas usaha tersebut akan memerlukan informasi akuntansi.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terdapat beberapa kriteria jumlah pekerja pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada suatu usaha. Pengelompokan berdasarkan besarnya jumlah pekerja yang dimiliki sebagai berikut: skala usaha mikro: < 5 orang, skala usaha kecil: 5 – 19 orang, dan skala menengah: 20-

99 orang. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis mendefinisikan skala usaha adalah pengukuran besar atau kecilnya suatu usaha yang berdasarkan jumlah pekerja dan pendapatan pada usaha yang berpengaruh terhadap kemampuan operasional usaha tersebut.

### **2.1.7 Pengetahuan Akuntansi**

Timotius (2000) dalam Evi dan Mitha (2015) mengartikan bahwa pengetahuan merupakan persepsi jelas akan apa yang dipandang sebagai fakta, kebenaran, atau kewajiban, informasi dan / atau pelajaran yang diteruskan sesuai perkembangannya zaman. Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengelompokkan, dan pengikhtisaran kejadian ekonomi dalam bentuk yang teratur dan logis dengan tujuan menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan operasional usaha. Dengan adanya akuntansi mampu memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu mengenai permasalahan keuangan dalam suatu usaha dan membantu pihak internal maupun eksternal dalam mengambil keputusan.

Pengetahuan akuntansi sangat diperlukan oleh manajer atau pemilik usaha dalam menjalankan operasi usahanya. Pengetahuan akuntansi pemilik tercermin melalui perlakuannya dalam pengelolaan keuangan usaha. Semakin baik pengetahuan akuntansi yang dimiliki oleh manajer atau pemilik usaha, maka semakin baik pula mereka menggunakan informasi akuntansinya.

### 2.1.7.1 Indikator Pengetahuan Akuntansi

Pengetahuan akuntansi sangat diperlukan oleh pihak internal dan eksternal perusahaan yang dimana berisikan informasi-informasi yang berhubungan dengan usaha tersebut yang berbentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut digunakan sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan. Adapun manfaat pengetahuan akuntansi menurut Abubakar dan Wibowo (2004) dalam Evi dan Mitha (2015) yaitu (1) mengetahui besarnya modal yang dimiliki perusahaan, (2) mengetahui perkembangan perusahaan, (3) sebagai dasar perhitungan pajak, (4) menjelaskan keadaan perusahaan sewaktu-waktu memerlukan kredit bank atau pihak eksternal lain, dan (5) dasar untuk menentukan kebijakan yang akan ditempuh.

Bonner dan Walker (1994) dalam Erna (2017) menyebutkan adapun indikator yang digunakan untuk mengukur pengetahuan akuntansi sebagai berikut:

1. Pengetahuan Deklaratif, adalah pengetahuan seseorang terhadap suatu informasi berdasarkan fakta dan konsep. Biasanya pengetahuan deklaratif tergantung dari instruksi yang ada. Contohnya: kas adalah bagian dari *current asset*; pengetahuan ini memudahkan dalam menganalisis rasio.
2. Pengetahuan Prosedural, adalah pengetahuan yang konsisten dengan aturan-aturan yang berdasarkan langkah-langkah sistematis atau prosedural dimana tahapannya meliputi *input* (data transaksi), proses sistematis (mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan) dan *output* (laporan keuangan). Contohnya: penggunaan catatan keuangan periode sebelumnya.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

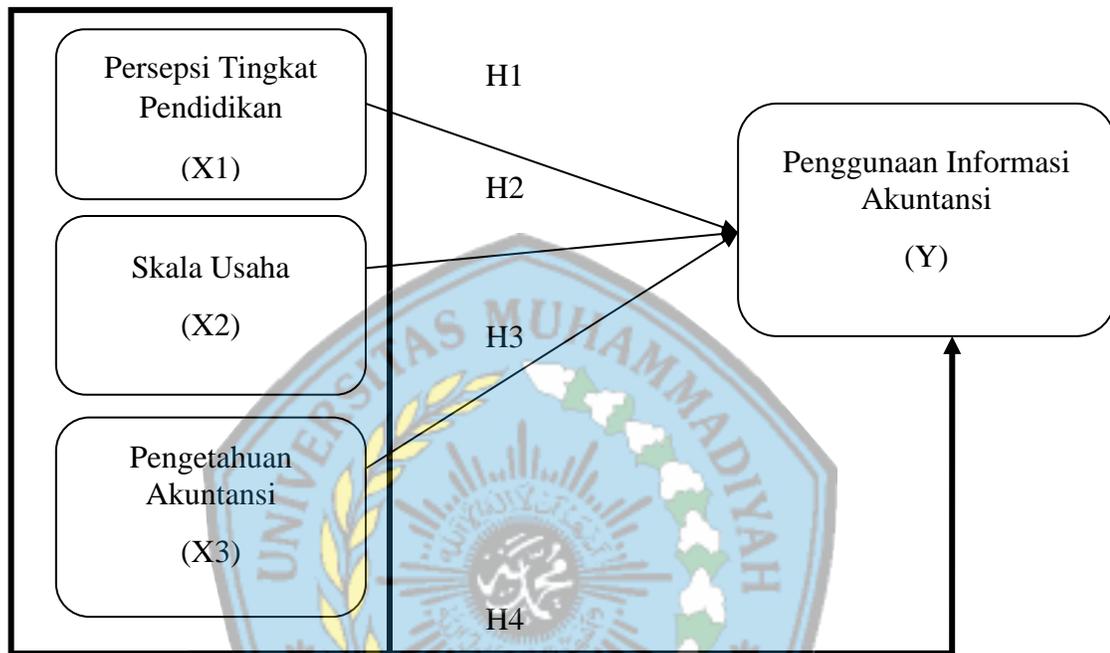
No	Peneliti dan Judul	Variabel	Hasil yang Diperoleh
1.	Dra. Listorini, M.Si dan Desi Ika, SE., M.Si (2018)  Pengaruh Jenjang Pendidikan dan Pelatihan Akuntansi terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi pada Usaha UMKM Binaan Bank SUMUT Medan	Independen : 1. Jenjang Pendidikan 2. Pelatihan Akuntansi  Dependen : Penggunaan Informasi Akuntansi	Secara Simultan: Jenjang pendidikan berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi.  Pelatihan akuntansi berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi  Secara Parsial: Jenjang pendidikan tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi  Pelatihan akuntansi berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi
2.	Ariska Tri Febriyanti, Zarah Puspitaningtyas, Aryo Prakoso (2017)  Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Skala Usaha, Umur Usaha terhadap Pemanfaatan Informasi Keuangan	Independen : 1. Tingkat Pendidikan Pemilik 2. Skala Usaha 3. Umur Usaha  Dependen : Pemanfaatan Informasi Keuangan	Tingkat pendidikan pemilik berpengaruh secara signifikan terhadap pemanfaatan informasi keuangan. Skala usaha tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemanfaatan informasi keuangan.  Umur usaha tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

			pemanfaatan informasi keuangan.
3.	<p>Yulia Astiani dan Endra Murti Sagoro,SE.,MSc (2017)</p> <p>Pengaruh Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah tentang Akuntansi, Pengetahuan Akuntansi, dan Skala Usaha terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi</p>	<p>Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persepsi Pelaku UMKM tentang Akuntansi</li> <li>2. Pengetahuan Akuntansi</li> <li>3. Skala Usaha</li> </ol> <p>Dependen :</p> <p>Penggunaan Informasi Akuntansi</p>	<p>Secara Parsial :</p> <p>Persepsi pelaku usaha mikro kecil dan menengah tentang akuntansi berpengaruh secara positif terhadap penggunaan informasi akuntansi.</p> <p>Pengetahuan akuntansi berpengaruh secara positif terhadap penggunaan informasi akuntansi.</p> <p>Skala usaha tidak berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi.</p>
4.	<p>Dewi Retno Sriwahyuni, Fatahurrazak, dan Inge Lengga Sari Munthe (2016)</p> <p>Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Tanjung Pinang.</p>	<p>Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan Akuntansi</li> <li>2. Masa Memimpin Perusahaan</li> <li>3. Umur Usaha</li> <li>4. Skala Usaha</li> <li>5. Pelatihan Akuntansi</li> <li>6. Pengetahuan Akuntansi</li> </ol> <p>Dependen :</p> <p>Penggunaan Informasi Akuntansi</p>	<p>Pendidikan akuntansi tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM.</p> <p>Masa memimpin perusahaan berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM.</p> <p>Umur usaha berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM.</p> <p>Skala usaha berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM.</p> <p>Pelatihan akuntansi berpengaruh terhadap</p>

			<p>penggunaan informasi akuntansi pada UMKM.</p> <p>Pengetahuan akuntansi tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM.</p>
5.	<p>Ni Made Rai Juniariani dan Made Gede Wirakusuma (2016)</p> <p>Pengaruh Pengetahuan Akuntansi dan Jiwa Kewirausahaan pada Penggunaan Informasi Akuntansi dalam Pembuatan Keputusan Investasi.</p>	<p>Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan Akuntansi</li> <li>2. Jiwa Kewirausahaan</li> </ol> <p>Dependen :</p> <p>Penggunaan Informasi Akuntansi</p>	<p>Pengetahuan akuntansi berpengaruh signifikan pada penggunaan informasi akuntansi dalam pembuatan keputusan investasi.</p> <p>Jiwa kewirausahaan berpengaruh signifikan pada penggunaan informasi akuntansi dalam pembuatan keputusan investasi.</p>
6.	<p>Enung Nurhayati dan Lia Dwi Martika (2015)</p> <p>Pengaruh Pengetahuan Akuntansi dan Skala Usaha terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Kuningan</p>	<p>Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan Akuntansi</li> <li>2. Skala Usaha</li> </ol> <p>Dependen :</p> <p>Penggunaan Informasi Akuntansi</p>	<p>Secara Parsial:</p> <p>Pengetahuan akuntansi berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi.</p> <p>Skala usaha berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi.</p> <p>Secara Simultan:</p> <p>Pengetahuan akuntansi berpengaruh secara positif terhadap penggunaan informasi akuntansi.</p> <p>Skala usaha berpengaruh secara positif terhadap penggunaan informasi akuntansi.</p>

### 2.3 Kerangka Pemikiran

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



### 2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah praduga sementara mengenai hubungan antar variabel yang akan diuji kebenarannya yang mengandung implikasi jelas terhadap pengujiannya. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka dibutuhkan suatu pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

#### **2.4.1 Pengaruh Persepsi Tingkat Pendidikan terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi**

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Payman (2008) dalam Linear dan Fuad (2013) mengemukakan bahwa pendidikan manajer atau pemilik usaha mempengaruhi penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi. Dengan bekal pendidikan yang dimiliki manajer atau pemilik usaha menjadi pertimbangannya untuk menghadapi persoalan yang dihadapinya berkaitan dengan profesinya. Semakin tinggi wawasan yang dimiliki oleh manajer atau pemilik maka akan mempengaruhi kemampuannya dalam mencapai kinerjanya secara optimal dan mendorong pemilik untuk memikirkan kelangsungan usahanya. Apabila pengelolaan manajerial suatu usaha baik, khususnya pengelolaan keuangan maka dapat menerapkan informasi akuntansi yang baik pula. Hasil penelitian Linear dan Fuad (2013) menyatakan tingkat pendidikan pemilik berpengaruh positif penggunaan informasi akuntansi pada usaha kecil dan menengah. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

**H1: Persepsi Tingkat pendidikan (X1) berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi (Y)**

#### **2.4.2 Pengaruh Skala Usaha terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi**

Skala usaha merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola usahanya dengan melihat jumlah karyawan yang dipekerjakan dan besarnya pendapatan yang diperoleh. Skala usaha berhubungan dengan penyediaan informasi akuntansi. Hal ini dikatakan bahwa semakin lama perusahaan beroperasi pada bidang yang sama sehingga mengalami perkembangan maka proporsi perusahaan dalam penyediaan informasi akuntansi semakin meningkat. Begitu pula dengan jumlah karyawan yang dipekerjakan suatu usaha dapat menunjukkan seberapa besar efektif perusahaan memperoleh pendapatan. Dengan jumlah karyawan yang proposional maka mendorong usaha tersebut menggunakan informasi akuntansi yang ada guna pengambilan keputusan. Penelitian terdahulu oleh Enung dan Lia (2015) menyatakan bahwa skala usaha berpengaruh secara positif terhadap penggunaan informasi akuntansi.

**H2: Skala usaha (X2) berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi (Y)**

#### **2.4.3 Pengaruh Pengetahuan Akuntansi terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi**

Pengetahuan akuntansi sangat diperlukan oleh manajer atau pemilik usaha dalam menjalankan usahanya. Motivasi untuk mempelajari pengetahuan akuntansi akan meningkatkan dan menambah wawasan manajer atau pemilik usaha dalam menerapkan akuntansi. Semakin tinggi motivasi untuk mempelajari akuntansi, maka

semakin baik pula pengetahuan akuntansi yang dimiliki, sehingga penggunaan informasi akuntansi sangat penting bagi operasional usaha. Seseorang dikatakan paham akuntansi apabila mengerti bagaimana proses akuntansi dilakukan dan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Holmes dan Nicholls (1989) dalam Evi dan Mitha (2015) menyatakan bahwa terjadinya permasalahan dalam penerapan akuntansi karena kurangnya pengetahuan manajer atau pemilik usaha yang akan menyebabkan kegagalan pada usahanya. Maka diperlukan untuk mengikuti pendidikan non-formal (pelatihan atau pengembangan *soft skill*) guna mengasah pengetahuan akuntansinya. Karena semakin rendahnya pengetahuan akuntansi yang dimiliki, maka penggunaan informasi akuntansi menjadi kurang diterapkan pada usahanya (Yulia, 2017). Penelitian terdahulu oleh Erna (2017) menyatakan bahwa pengetahuan akuntansi berpengaruh secara positif terhadap penggunaan informasi akuntansi.

**H3: Pengetahuan akuntansi (X3) berpengaruh secara positif terhadap penggunaan informasi akuntansi (Y)**

#### **2.4.4 Pengaruh Persepsi Tingkat Pendidikan, Skala Usaha, dan Pengetahuan Akuntansi terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi**

Dari hipotesis – hipotesis yang telah dijabarkan diatas, secara parsial masing-masing variabel penelitian berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Penggunaan informasi akuntansi berhubungan terhadap tingkat pendidikan, skala usaha, dan pengetahuan akuntansi. Dengan demikian, tingkat pendidikan mempengaruhi pengetahuan dalam menjalankan usahanya. Semakin besarnya suatu

usaha dan kompleksitas usaha sehingga kebutuhan akan informasi akuntansi bermanfaat sebagai alat dalam pengambilan keputusan. Kemampuan seorang manajer dalam mengambil keputusan dinilai dari seberapa besar pengetahuan akuntansi yang dimiliki agar dapat membaca dan menafsirkan setiap informasi akuntansi yang dihasilkan tepat.

Pada penelitian Donna dan Leny (2018) memperoleh hasil bahwa secara simultan skala usaha, latar belakang pendidikan, dan pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Maka perumusan hipotesis yang dapat disimpulkan secara simultan adalah sebagai berikut:

**H4: Persepsi Tingkat pendidikan, skala usaha, dan pengetahuan akuntansi (X4) berpengaruh simultan terhadap penggunaan informasi akuntansi (Y)**